



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA WIBAWA
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 836913

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.655.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166.98 m2/125 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 211.15 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah Seluas 179.76 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. Tanah Seluas 3520 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.200.000

1. LAINNYA, EXPLORE-200 SEPEDA LIPAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 188.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.335.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 373.295.864

F. HARTA LAINNYA Rp. 39.332.208

Sub Total Rp. 3.331.163.072



III. HUTANG

Rp. 831.060.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.500.102.272

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.